



Journal of Government Science Studies
Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>
Vol. 3 No. 1, April 2024, pages: 1-8
e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461
<https://doi.org/10.53730>



Eksistensi Ulama Dayah dalam Perpolitikan di Aceh Tahun 2024

Muhammad Novriansyah^a, Zuriah^b, Teuku Amnar Saputra^c

Email Corespondensi: teukuamnar@gmail.com

Manuscript submitted: 11-09-2023, Manuscript revised: 20-09-2023, Accepted for publication: 28-04-2024

Keyword:

Existence;
Ulama Dayah;
Political;
Aceh.

Abstract: From time to time, the role of Ulama in Indonesia has been very important in its position, as well as in Aceh as a region that upholds Islamic law. The role of Ulama is not only limited to educators and lecturers in mosque pulpits, but historically they have also been very influential in the resistance against colonialism. After MOU Helsingki between Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM), many local parties emerged in political contestation, one of which was a party dominated by ulama. The role of ulama, who are basically educators, is starting to exist in the world of politics. This research aims to determine the existence of Ulama Dayah in politics in Aceh, as well as to determine the role of Ulama Dayah in politics in Aceh. This research is qualitative research with a phenomenological approach. Data collection techniques were carried out using participant observation and documentation. The results of the research show that Ulama Dayah are increasingly present in politics in Aceh, especially seen from the existence of new parties that are clearly affiliated with Ulama Dayah. Then, looking at the role of the Ulama in Aceh from time to time, they have played many roles in society apart from being educators. Ulama play an active and passive role in political contestation in Aceh.

Kata Kunci:

Eksistensi;
Ulama Dayah;
Politik;
Aceh.

Abstrak: Dari masa ke-masa peran Ulama di Indonesia sangat penting dalam kedudukannya, begitu juga di Aceh sebagai daerah yang menjunjung tinggi syari'at Islam. Peran Ulama bukan hanya sebatas pendidik dan penceramah dalam mimbar-mimbar mesjid, melainkan secara historis juga sangat berpengaruh dalam perlawanan terhadap penjajah. Pasca MOU Helsingki antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) banyak kemunculan partai lokal dalam kontestasi politik salah satunya adalah partai yang didominasi para ulama. Peran ulama yang pada dasarnya pendidik mulai eksis dalam dunia perpolitikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Ulama Dayah dalam Perpolitikan di Aceh, serta untuk mengetahui peran ulama Dayah dalam politik di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama dayah semakin eksis dalam perpolitikan di Aceh terutama dilihat dari adanya partai baru yang sangat jelas berafiliasi pada ulama dayah. Kemudian dilihat dari perannya para ulama di Aceh dari masa kemasa memiliki peran yang sangat banyak dalam masyarakat selain sebagai pendidik. Para Ulama berperan aktif maupun pasif dalam kontestasi politik di Aceh.

^a Sekolah Tinggi Ilmu Syariah

(STIS) PTI Al-Hilal Sigli, Indonesia

^b A Universitas Islam Kebangsaan
Indonesia (UNIKI) Bireuen,
Indonesia

^c Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
(STIT) PTI Al-Hilal Sigli, Indonesia

1 Pendahuluan

Dewasa ini kiprah para ulama dayah juga terlihat aktif dalam partisipasi politik di Aceh. Para ulama memiliki peran yang sangat banyak dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari adanya peran setiap ulama hampir di semua lini perjuangan bangsa. Sebagaimana diketahui juga para ulama tidak hanya memiliki peran sebagai pendidik generasi bangsa, dalam sejarah tercatat bahwa ada banyak perjuangan baik secara intelektual maupun peperangan para ulama turut mengemban tugas sebagai barisan terdepan perjuangan. Dua organisasi ulama terbesar sejauh ini telah membuktikan kiprahnya dalam kemerdekaan Indonesia. (Ahmad, 2022; Hidayah & Birsyada, 2022) Begitu juga dengan Aceh yang merupakan bekas Negara Islam sangat menjunjung tinggi peran para ulama dalam kenegaraan. (Paisal, 2021) Para ulama sejauh ini telah memiliki kekuatan masa melalui para santri yang didiknya memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan perlawanan dan perjuangan. Dilihat dari perkembangannya dari masa ke-masa para ulama telah terjun kedalam perpolitikan secara nyata. Dalam kacamata sejarah, para ulama tidak pernah melepaskan diri dari dunia perpolitikan yang saat ini menjadi panggung perebutan semua kalangan. Di Aceh pergulatan para ulama dalam kenegaraan pada masa kerajaan Aceh menjadi penentu dalam setiap kebijakan publik. Para ulama menyadari betul bahwa pemerintah harus selalu diawasi dan di kontrol agar tidak menyimpang dengan syariat.

Kontestasi politik yang semakin ketat telah mengembangkan narasi agama sebagai bahan dan simbol yang di pertunjukkan ke khalayak ramai. Pemilihan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 silam telah menampilkan kepada kita bagaimana narasi keagamaan dibangun, sehingga para kandidat mengklaim dukungan dari beberapa tokoh keagamaan untuk kekuatan politiknya. Aksi 212 juga dapat dilihat sebagai klaim tersebut, karena mencoba mengusung salah satu kandidat capres masa itu. Banyak para tokoh terkemuka mendeklarasikan diri memihak kepada salah satu calon yang pada akhirnya Kemenangan menjadi milik Presiden Joko Widodo dengan mengandeng K.H Ma'ruf Amin sebagai wakil presidennya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, bahkan hingga tingkat daerah narasi keagamaan menjadi kuat dan banyak para ulama, dalam konteks ke Aceh adalah para ulama Dayah mulai terjun ke dunia perpolitikan. Tidak hanya itu penggunaan simbol-simbol agama sebagai motif menggalang dukungan juga kerap digunakan untuk merebut hati para rakyat. Semua mata dapat melihat dan semua orang dapat merasakan bahwa fenomena tersebut telah terjadi pada banyak kalangan politisi saat ini. Bukan tanpa alasan, para ulama pun bergerak atas dasar kegelisahan tentang penodaan dan penistaan agama, sehingga ikut bergabung dalam kontestasi politik demi merebut ruang publik, sehingga dengan leluasa dapat melahirkan kebijakan yang pro terhadap agama dan kemaslahatan umat. Munculnya polulisme dalam wajah politik keagamaan dalam sebuah penelitian disebabkan karena tingginya angka korupsi sehingga mengakarnya keinginan untuk membentuk negara berdasar agama serta perlunya penguatan peran agama dalam penyelenggaraan negara (Herianto & Wijanarko, 2022).

Pasca perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI), Aceh memasuki babak baru dalam dunia perpolitikan, termasuk kiprah ulama dayah dalam kontestasi politik. Sejauh ini sebagai mana diketahui bahwa ulama dayah hanya memfokuskan diri pada proses pembinaan santri di dayah atau pesantren serta memiliki partisipasi politik yang pasif karena ruang gerak yang terbatas. Namun seiring berkembang zaman, tepatnya pasca MOU Helsinki para ulama dayah mulai berpartisipasi aktif dalam dunia perpolitikan hingga memunculkan partai yang secara tegas berafiliasi dan beranggotakan para Ulama Dayah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh

mana eksistensi politik ulama dayah di Aceh serta untuk mengetahui peran ulama daya dalam perpolitikan di Aceh.

Penelitian tentang partisipasi politik ulama pada dasarnya sudah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yel Partasari, yang meneliti tentang peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik di pilkada 2018 (Sari et al, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki peran yang penting terhadap pemilihan kepala daerah, dimana studinya dilakukan di desa Betung. Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Muazzin tentang partisipasi politik tokoh Agama pada pilkada Aceh Selatan pada tahun 2018 (Muazzin, 2022), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa para ulama aktif berpartisipasi dalam memberikan dukungannya serta mengarahkan masyarakat untuk memilih calon kepala daerah tertentu. Dalam kajian konseptual tentang partisipasi politik ulama, penelitian dilakukan masih dalam konteks yang sangat umum, yaitu tentang kebolehan atau keharusan para ulama dalam berpolitik. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suriyanto, tentang Ilmu dan Kekuasaan dan Poros-poros Politik.(Suriyanto, 2023). Dalam kesimpulannya disebutkan keharusan para ulama untuk berpolitik guna memudahkan jalan dakwah ketika ulama dapat memegang kekuasaan. Penelitian yang sangat dekat dengan penelitian ini berdasarkan penelusuran peneliti hanya dilakukan oleh Rasyad, Dkk yang meneliti tentang Ulama dan Politik, studi pada partisipasi politik ulama dan santri pada pemilu 2019 silam (Rasyad et al, 2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama berperan aktif dalam mengerahkan para santri untuk mendukung salah satu calon presiden. Namun partisipasi politik para ulama hanya berafiliasi dengan beberapa partai lokal maupun nasional. Secara spesifik penelitian tentang eksistensi Ulama Dayah dalam Perpolitikan di Aceh menjelang tahun pemilu 2024 belum tersentuh sama sekali. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting mengingat masih sangat sedikitnya literatur tentang perpolitikan ulama, khususnya Ulama Dayah yang ada di Aceh pasca perdamaian. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan lebih lanjut tentang perpolitikan ulama dalam kajian yang lebih besar dan lebih konkrit.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan yang mencoba mencari makna dari sebuah fenomena. (Tumangkeng & Maramis, 2022) Fenomena dalam penelitian ini adalah kiprah politik para ulama dayah yang dewasa ini mulai muncul kepermukaan, salah satunya adalah muncul partai politik lokal yang berbasis para Ulama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data observasi partisipan. Observasi partisipan merupakan keterlibatan peneliti secara langsung kedalam kegiatan sehari-hari atau objek yang diamati. (Setiawan, 2018) Dalam konteks penelitian ini peneliti melakukan observasi secara pasif yaitu dalam kacamata masyarakat yang ikut merasakan pergerakan para Ulama Dayah. Kemudian peneliti melakukan studi dokumentasi pada beberapa media online dan media masa. Metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.(Setiawan, 2018) Dokumentasi dilakukan pada media online serta data online dari beberapa website yang terpercaya. Dalam penelusuran tersebut, peneliti juga mengambil wawancara secara tidak langsung, yakni wawancara yang ada pada media online sebagai sumber data.

3 Hasil dan Diskusi

Ulama Dayah dalam Politik di Aceh

Ulama bukan merupakan suatu istilah asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim. Istilah ulama sering dijumpai di berbagai sumber bacaan yang bernuansakan islam. Secara istilah kata ulama berasal dari bentuk jamak dari kata 'Alim yang kemudian

diartikan sebagai “*orang yang mengetahui*” atau “*orang yang berpengetahuan*”. (Hikmah, 2023) Orang yang berpengetahuan tentang suatu bidang dapat disebut dengan ulama di bidang tersebut, atau orang yang alim dengan bidang yang dimaksud. Kendati demikian istilah Ulama sering disandingkan dengan seseorang yang paham tentang agama dan diidentikkan dengan orang yang saleh serta memiliki spiritualitas yang baik. Abu Hurairah Abdussalam mengatakan bahwa dalam Bahasa Arab kata ulama juga sering di gunakan dalam konotasi scientist yakni pada mereka yang pakar di bidang keilmuan tertentu, seperti fisika, kedokteran, nuklir dan ilmu lainnya. (Hikmah, 2023), dalam pandangan yang lebih kompleks tentang konsep ulama juga hampir senada dengan apa yang telah kita diskusikan di atas. Dalam pandangan tafsir Al-Azhar, ulama di artikan sebagai orang-orang yang takut dan kagum akan Allah SWT yang bersumber dari pengetahuan mereka tentang fenomena sosial dan alam raya yang telah Allah SWT ciptakan (Fatih, 2019). Istilah ulama juga dalam pandangan ini tidak dibatasi dalam konteks pengetahuan agama saja, melainkan ilmu-ilmu lain juga yang bersumber dari penyelidikan ilmiah terhadap fenomena sosial maupun alam raya. Atas dasar ini lah orang-orang yang dapat disebut ulama menjadi takut maupun takjub atas kebesaran Allah SWT.

Di Aceh para ulama sering diidentikkan dengan orang yang berafiliasi dengan Dayah. Dayah merupakan sebuah lembaga pendidikan atau dikenal dengan istilah Pesantren pada umumnya yang ada di Indonesia. Daya merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan mendidik manusia yang berkepribadian islami, menjadi umat yang berguna bagi bangsa dan negara serta agama. (Usman & Hadi, 2022) Dayah merupakan lembaga pendidikan yang dapat dikategorikan formal di Aceh, karena sejauh ini pelaksanaan kegiatan Dayah sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Lembaga Pendidikan Islam Dayah juga mendapatkan ijin resmi dari Pemerintah Indonesia, hal ini dapat dilihat dari adanya Dinas Pendidikan Dayah di Provinsi Aceh. Dinas Pendidikan Dayah ini dulu dikenal sebagai Badan Dayah yang didirikan pada tahun 2008 berdasarkan UUPA Nomor 11 tahun 2006, Qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga Daerah Provinsi Nanggroe aceh Darusalam. Serta Qanun No 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh. (Usman & Hadi, 2022).

Istilah ulama di Aceh juga sering disebut dengan nama Teungku, yang memiliki arti yang sama yaitu seseorang yang seorang yang memahami ilmu agama dan telah belajar di dayah atau pesantren (Nurlaila & Zulihafnani, 2019), para ulama atau teungku sejauh ini telah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, bukan hanya sebatas pemuka agama, peran para ulama ini menurut catatan Snouck Horgrunje para ulama di Aceh telah memiliki peran dalam politik yang sangat kuat sehingga hampir 70 tahun peperangan Aceh melawan belanda di monitoring oleh para ulama. (Nurlaila & Zulihafnani, 2019). Dalam penelitian ini kita dapat menspesifikkan bahwa yang dimaksud Ulama Dayah pada dasarnya adalah semua ulama yang berafiliasi dengan latar belakang pendidikan dayah maupun mereka yang sedang menjalankan lembaga pendidikan dayah. Lebih sederhananya adalah alumni dayah, dewan guru maupun pimpinan Dayah sudah masuk dalam kategori ulama Dayah.

Peran dan pengaruh para Ulama Dayah dalam perpolitikan di Aceh dapat dilihat dari praktik yang selama ini dijalankan. Dalam pengalaman peneliti sebagai bagian dari masyarakat Aceh, para ulama kerap menunjukkan keberpihakan maupun penentangan dan kritik terhadap politik dalam mimbar-mimbar dakwahnya. Partisipasi politik dari para ulama Dayah juga dapat terlihat dari adanya organisasi-organisasi yang dibentuk dengan berbagai tujuan. Organisasi ulama yang pertama sekali terbentuk di wilayah Aceh adalah Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tahun 1939 yang berkiprah dalam mengembangkan pendidikan di Aceh serta memainkan peran politik dalam rangka mengusir Belanda di Aceh. Kemudian setelah PUSA bubar muncul lembaga-lembaga lain seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Wahsliyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1969 para Alim Ulama se-Aceh bersepakat untuk membantuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). MPU ini kemudian diseragamkan dengan menjadi nama MUI, kendatipun demikian nama MPU dewasa ini kembali digunakan. (Nurlaila & Zulihafnani, 2019, p. 95) Kemudian para ulama salafi juga membentuk organisasi yang dinamakan HUDA (Himpunan Ulama Dayah), Insafuddin lebih mengkonsentrasikan pada pendidikan serta Rabithah Thaliban Aceh (RTA) yang beranggotakan murid-murid atau santri dari

dayah salafi. Pasca MOU Helsinki juga dibentuk salah satu organisasi ulama yang berafiliasi kepada salah satu partai politik lokal yang diberinama dengan MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh) (Nurlaila & Zulihafnani, 2019).

Keterlibatan politik Ulama Dayah pada saat ini tidak hanya sebatas keorganisasian dan afiliasi politik terhadap salah satu partai. Pasca MOU Helsinki sudah mulai adanya pembentukan partai-partai politik yang didalamnya terdiri dari para Ulama Dayah. Dalam kontestasi politik pada tahun 2024 mendatang, ada 6 partai lokal Aceh yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu, Partai Aceh (PA), Partai Adil Sejahtera (PAS), Partai Gegerasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (GABTHAT), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA). (Humas, 2022) Diantara ke 6 partai tersebut 2 partai orientasi para anggotanya adalah para ulama, yaitu Partai Darul Aceh dan Partai Adil Sejahtera. Partai Darul Aceh (PDA) juga merupakan salah satu partai politik tertua di Aceh yang telah tiga kali mengganti namanya, kemudian Partai Adil Sejahtera (PAS) merupakan partai baru yang didirikan pada 10 November 2021 silam. Partai ini memiliki basis ideologi Islam dan berbasis Dayah. berdirinya PAS Aceh di deklarasikan pada 22 Februari 2023 setelah sebelumnya hasil Ijtima' Ulama Aceh dalam Silaturahmi Ulama Aceh (SUA) (Arjanto, 2023). Terlepas dari adanya pro dan kontra terhadap perpolitikan para ulama dalam masyarakat, pada kenyataannya para ulama zaman sekarang semakin eksis dalam dunia perpolitikan. Jika dilihat dari adanya partai-partai tersebut bahwa partisipasi politik ulama Dayah semakin meningkat dari masa ke masa.

Eksistensi Politik Ulama Dayah

Aceh sebagai salah satu daerah yang pernah berjayanya kerajaan Islam di Asia menjadi salah satu daerah yang sangat menjunjung tinggi peran Ulama dalam setiap lini kehidupan. Para Ulama menjadi motor penggerak bagi kehidupan bermasyarakat di Aceh dari masa kemasa. Peran para Ulama pada dasarnya merupakan seorang pendidik masyarakat untuk memahami nilai-nilai keislaman guna terciptanya masyarakat muslim yang taat kepada ajaran agama. Jika dilihat secara historis maka para ulama di Aceh sejauh ini telah berperan dalam banyak hal seperti sebagai guru, para pejuang, politisi, dan pelaksana serta pengontrol syariat Islam (Paisal, 2021). Kiprah para ulama dalam perpolitikan di Aceh jika dilihat pada masa Aceh masih sebagai wilayah Kerajaan maka akan ditemukan bahwa peran ulama jauh lebih penting karena langsung disandingkan dengan raja atau penguasa. Para ulama dalam sejarah kerjaan Aceh di tempatkan pada posisi Qadhi malikul Adil dan sebagai penasihat sultan (Muhammad, 2020). Jon Paisal membagi peran Ulama dalam masyarakat Aceh kedalam empat peran.

Pertama sebagai guru, peran ulama dalam masyarakat Aceh dari masa awal masuknya Islam hingga sekarang adalah sebagai pendidik. Para ulama biasanya menyelenggarakan pendidikan di Dayah, Balai pengajian, atau mushala dalam bahasa Aceh disebut dengan meunasah. *Kedua* berperan dalam peperangan dengan penjajah dan konflik-konflik di Aceh. Para Ulama di Aceh dari masa ke masa juga giat berperang melawan para penjajah serta menjadi komando perang bagi masyarakat dalam melakukan perlawanan. Para ulama juga sebagai motivator perang yang menyerukan jihad fi sabillillah yang membuat semangat masyarakat untuk berperang. Hal ini yang kemudian membuat Aceh menjadi daerah yang sangat sulit ditaklukkan. Pasca kemerdekaan banyak konflik-konflik Aceh dan RI juga terlibat para ulama didalamnya untuk menuntut beberapa hal penting yang tidak mungkin dibahas dalam penelitian ini. Ketiga peran ulama pasca konflik antara RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pada masa ini peran ulama menjadi lebih penting terutama pasca perdamaian dimana para ulama di Aceh diberikan legitimasi untuk membentuk lembaga yang saat ini dinamakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Meskipun hampir sama perannya dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MUI), lembaga MPU menjadi mitra kerja legislatif, eksekutif bahkan pihak yudikatif, dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam kebijakan pemerintahan Aceh. Keempat berperan dalam menjaga Adat Aceh. Adat merupakan hal terpenting dalam masyarakat Aceh, hadirnya para ulama sebagai penjaga atau pengontrol terhadap keselarasan antara adat dan syari'at Islam yang ada di Aceh. Saat ini juga telah dibentuk majelis adat Aceh (MAA) sebagai lembaga yang mewadahnya. (Paisal, 2021).

Kedudukan Ulama Dayah memiliki posisi yang sangat penting dalam masyarakat, termasuk dalam pemberian fatwa. Meskipun di Aceh sudah ada lembaga resmi dalam pemberian fatwa yakni MPU, nyatanya fatwa ulama Dayah menjadi lebih kuat diadopsi oleh Masyarakat (Nurlaila & Zulihafnani, 2019). Meskipun Ulama Dayah tidak bersentuhan langsung dengan pemerintah, namun sosialisasi fatwa lebih efektif jika dilakukan oleh para ulama Dayah. Sebagai pendidik yang terjun ke dalam masyarakat langsung, ulama Dayah menjadi orang yang dihormati dalam masyarakat. Selain mengajarkan agama, ulama juga berfungsi dalam beragam ritual kehidupan masyarakat. Seperti mendoakan dan menshalatkan jenazah, mendamaikan yang berseteru, membantu pembagian harta warisan, memimpin prosesi-prosesi adat dalam masyarakat, dan lainnya. Sepak terjang yang seperti ini membuat para ulama menjadi lebih spesial karena perannya yang tidak dapat diganti oleh orang selain ulama, yang kemudian membuat apapun yang dikatakan, baik itu seruan maupun larangan akan didengarkan oleh masyarakat, termasuk urusan perpolitikan.

Para Ulama Dayah dalam mimbar dakwah maupun dalam balai-balai pengajian memiliki otoritas yang tinggi dalam memberi pengaruh terhadap arah politik yang ingin dituju. Otoritas Ulama Dayah digunakan dalam peperangan politik dari waktu-kewaktu oleh beberapa pihak. Para aktor politik memanfaatkan klaim dukungan para Ulama Dayah untuk merebut kursi politiknya adanya masa yang senantiasa setia dibalik karismatikanya sosok Ulama Dayah. Tentu klaim keberpihakan para Ulama ini memiliki dampak yang signifikan dalam pemerolehan suara yang akan dilakukan. Praktik ini dalam fakta saat ini dapat terlihat secara jelas dalam setiap edisi kampanye politik. Dalam mimbar kampanye tak luput juga para ulama diajak untuk disandingkan dalam orasi politik. Salah satunya misalnya klaim dukungan yang dilakukan oleh Waled NU dalam dukungan politik pada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden tahun 2019 silam dan disertai oleh klaim dari beberapa Ulama lainnya (antaranews.com, 2019).

Dari amatan peneliti sebagai masyarakat Aceh, setiap kampanye politik yang dilakukan di tempat-tempat umum, para Ulama sering menjadi tombak pembicara dalam penggalangan dukungan. Sebagai daerah yang kental akan nilai-nilai keislaman, para politisi menjadi yakin bahwa otoritas keagamaan dan narasi keagamaan dapat digunakan untuk menggiring masa dalam pemilihan. Namun belakangan ini banyak para Ulama yang mulai memisahkan diri dengan para politisi dan memilih menjadi politisi itu sendiri. Munculnya gerakan politik baru berwajahkan para Ulama Dayah bukan sebuah spontanitas belaka, melainkan adanya keinginan untuk memperbaiki negeri yang dianggap sudah banyak penyimpangan dari ajaran agama. Hal ini nyatanya berlaku secara umum di seluruh Indonesia sebagaimana yang dikatakan oleh Hubertus Herianto, Dkk bahwa munculnya populisme narasi keagamaan disebabkan tingginya angka korupsi dan isu lain yang menyebabkan adanya gerakan ingin menjadikan negara berasaskan agama dan agama berperan dalam penyelenggaraan negara. Barangkali ini sebagai salah satu bentuk atau cara yang ditempuh untuk merebut ruang publik untuk merubah kebijakan-kebijakan yang dianggap sesuai dengan syari'at.

Eksistensi politik Ulama Dayah di Aceh kemudian dapat dilihat dalam dua perspektif. *Pertama* Ulama Dayah yang langsung terjun dalam dunia politik. Kondisi ini dapat dilihat dari lahirnya salah satu partai yang sangat identik dengan kedayahan. Partai Adil Sejahtera atau disingkat dengan PAS merupakan salah satu partai lokal Aceh yang berbasis Dayah (Partai Adil Sejahtera Aceh). Meskipun ada partai sebelumnya yang juga terdiri dari para ulama, namun partai PAS lebih menspesifikan diri dan mengklaim bahwa partai ini lebih didominasi oleh para ulama Dayah sebagaimana kutipan di atas. Pada saat pendiriannya banyak para Ulama karismatik di Aceh yang mendukung partai PAS untuk maju dan menang di pemilu 2024 mendatang. Sebagaimana salah satu ulama karismatik Aceh yaitu Abuya Mawardi Waly mengajak semua masyarakat Aceh untuk memenangkan partai PAS. (Redaksi, 2023) dalam deklarasinya pada tahun 2021 lalu banyak ulama karismatik menandatangani pernyataan kelahiran dan visi misi partai. Harapan paling tinggi dari kemenangan yang dicapai oleh partai PAS adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam politik Aceh serta mewujudkan model pemerintahan eksekutif dan legislatif yang adil dan berpihak kepada rakyat serta menjaga eksistensi agama.

Perspektif *kedua* adalah para Ulama Dayah yang tidak terjun secara langsung. Ulama Dayah yang langsung terjun dalam dunia politik dapat dijumpai dari kiprahnya sebagai pemimpin ataupun pengurus partai politik. Partai Adil Sejahtera yang baru didirikan pada tahun 2021 lalu memiliki karakteristik yang sangat khas dengan para Ulama Dayah. Kemudian para ulama dayah yang tidak secara langsung terjun dalam dunia politik memilih mimbar dakwah maupun balai-balai pengajian sebagai tempat mengkampanyekan keberpihakan kepada lawan politik. Kendatipun demikian dalam persepsi masyarakat masih terjadi perbedaan pro dan kontra terhadap para ulama yang berpolitik (Wahid, 2020). Sehingga tidak tutup kemungkinan bahwa ada sebagian para ulama yang anti politik dan menfokuskan diri dalam hal ibadah saja, namun keberadaannya masih belum dapat diidentifikasi dalam penelitian ini.

4 Kesimpulan

Ulama Dayah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya. Selain sebagai pendidik ulama di Aceh memiliki peran yang bervariasi, termasuk dalam urusannya dengan politik. Pasca perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) muncul beberapa partai lokal yang didalamnya juga terdiri dari para Ulama Dayah. Jika dilihat dari perkembangannya Ulama Dayah saat ini mulai eksis dalam dunia perpolitikan. Ada dua klasifikasi partisipasi politik yang dapat dilihat dari para ulama dayah, yaitu Ulama Dayah yang terjun langsung dalam dunia politik dengan menjadi pengurus atau pemimpin partai, kemudian ada juga yang berpartisipasi secara tidak langsung, yaitu melalui keberpihakannya kepada salah satu partai politik atau para politisi.

Referensi

- Ahmad, J. (2022). Analisis Keberhasilan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v4i1.176>
- antaranews.com. (2019, March 23). Ulama Aceh Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/814549/ulama-aceh-deklarasi-dukung-jokowi-maruf-amin>
- Arjanto, D. (2023). Mengenal 6 Partai Lokal Aceh di Pemilu 2024. *Tempo*. <https://pemilu.tempo.co/read/1736757/mengenal-6-partai-lokal-aceh-di-pemilu-2024>
- Fatih, M. (2019). Konsep Ulama dalam Pandangan Mufassir Indonesia: Studi Aspek-aspek Keindonesiaan dan Metodologi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Penafsirannya terhadap Term "Ulama" dalam al-Qur'an. *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction*, 3(2), 67-78.
- Herianto, H., & Wijanarko, R. (2022). Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.39581>
- Hidayah, S. N., & Birsyada, M. I. (2022). Peranan Ulama Muhammadiyah dalam Pembentukan APS (Askar Perang Sabil) di Yogyakarta Tahun 1947-1949. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.17509/historia.v5i1.34537>
- Hikmah: Siapa yang Dimaksud Ulama? (n.d.). Retrieved August 10, 2023, from <https://istiqlal.or.id/blog/detail/hikmah--siapa-yang-dimaksud-ulama-.html>
- Humas. (2022). KPU Tetapkan 17 Partai Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh Jadi Peserta Pemilu 2024. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/kpu-tetapkan-17-partai-nasional-dan-6-partai-politik-lokal-aceh-jadi-peserta-pemilu-2024/>
- Muazzin, M. (2022). Partisipasi Politik Tokoh Agama Pada Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(1).
- Muhammad, I. (2020). Sejarah Islam Dan Tradisi Keilmuan Di Aceh. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/jm.v10i2.7843>
- Novriansyah, M., Zuriah, & Saputra, T.A. (2024). Eksistensi Ulama Dayah di Aceh Tahun 2024. *Journal of Governance and Social Policy*, 3.. (1).

- Nurlaila, N., & Zulihafnani, Z. (2019). Pengaruh Fatwa Ulama Dayah Dalam Masyarakat Aceh. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 94.
- Paisal, J. (2021). Peran Ulama Dalam Masyarakat Aceh Dari Masa Kemasa. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 89–104. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.513>
- Partai Adil Sejahtera Aceh. (2023). In Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Partai_Adil_Sejahtera_Aceh&oldid=23090951
- Rasyad, R., Ikhwan, I., Manan, A., & Putra, R. S. (2022). ULAMA AND POLITICS: A Study of Ulama and Santri's Participation in 2019 General Election in Aceh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 46(1), Article 1. <https://doi.org/10.30821/miqot.v46i1.787>
- Redaksi. (2023). Pemilu 2024, Ulama Aceh Ajak Menangkan Partai Adil Sejahtera | Rakyat Aceh. <https://harianrakyataceh.com/2023/02/23/pemilu-2024-ulama-aceh-ajak-menangkan-partai-adil-sejahtera/>
- Sari, Y. P., Masyhur, M., & Fikri, M. S. (2021). Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Pilkada 2018 di Desa Batung. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 2(2), 133–142.
- Setiawan, A. A., Johan. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Surianto, S. (2023). Ilmu Dan Kekuasaan: Ulama Dan Poros-Poros Politik. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 0, Article 0.
- Tumangkeng, S. Y. L., & Maramis, J. B. (2022). Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 14–32.
- Usman, A. S., & Hadi, A. (2022). Manajemen Lembaga Pendidikan Dayah. *Intelektualita*, 10(02), Article 02. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/12617>
- Wahid, A. (2020). Pola Peran Ulama Dalam Negara Di Aceh. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 17(1), 85–92.